



DOKUMEN PENGELOLA RISIKO



**DINAS
KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya sehingga kami dapat menyelesaikan kertas kerja Pengelolaan Risiko pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025. Kertas kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para Stakeholder, sebagai pertimbangan dalam pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengelolaan risiko dilakukan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah. Kertas kerja ini memuat penetapan risiko strategis, penetapan risiko operasional, proses analisis risiko, rencana kegiatan pengendalian risiko yang ada di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Penyusunan kertas kerja ini telah memperhatikan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kertas kerja ini. Selanjutnya, kami berharap agar kertas kerja ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik.

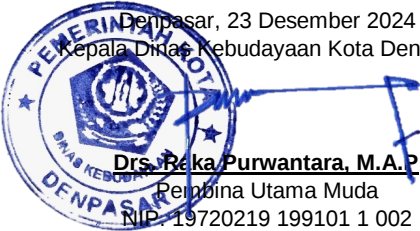
Om Santih, Santih, Santih Om.



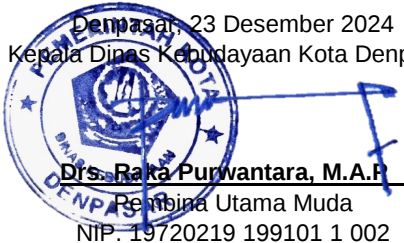
Denpasar, 23 Desember 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
Pemuda Utama Muda
NIP. 197202191991011002

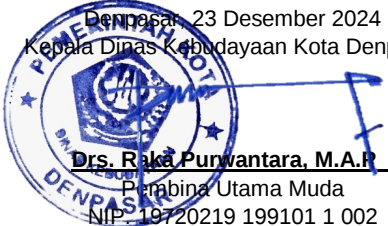
Form 2.b
Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali				
Penilaian Tahun	:	2025				
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD 2021 - 2026				
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
OPD yang Dinilai	:	Dinas Kebudayaan				
Sumber Data	:	Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2021 - 2026				
Tujuan Strategis	:	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar				
Sasaran Strategis	:	1. Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya 2. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya 4. Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar				
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target			
	1	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%			
	2	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%			
	3	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%			
	4	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%			
Informasi Lain						
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan strategis: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya 2. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya 4. Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar IKU Strategis: 1. Persentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya 2. Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya 3. Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya 4. Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi				
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan strategis: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya IKU Strategis: Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya				
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan strategis: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya IKU Strategis: Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya				
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan strategis: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Seni dan Budaya IKU Strategis: Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya				
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan strategis: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar IKU Strategis: Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi				
Denpasar, 23 Desember 2024 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  Drs. Reka Purwantara, M.A.P. Pembina Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002						

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:	2025		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Sumber Data	:	Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar			
Program (Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2025)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target	
	1	Persentase Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
	2	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
	3	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
	4	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
	5	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
	6	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
Informasi lain				
Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah			
Denpasar, 23 Desember 2024 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  Drs. Raka Purwantara, M.A.P. Pemimpin Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002				

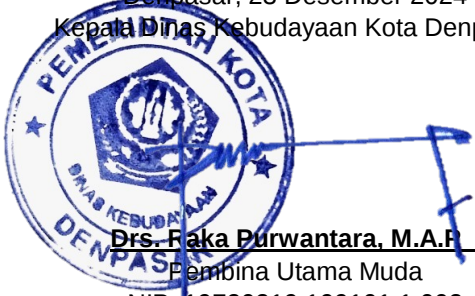
Form 2.c.1
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Penda	:	Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:	2025		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Sumber Data	:	Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar			
Program (Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2025)	Program Pengembangan Kebudayaan			
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target	
	1	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	
	2	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	
	3	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	
Informasi lain				
Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan 2. Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional 3. Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat			
 Denpasar, 23 Desember 2024 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar <u>Drs. Raka Purwantara, M.A.P.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002				

Form 2.c.2
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:	2025		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Sumber Data	:	Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar			
Program (Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2025)	Program Pembinaan Sejarah			
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan		Target
	1	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		100%
Informasi lain				
Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			
 Denpasar, 23 Desember 2024 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar <u>Drs. Faka Purwantara, M.A.P</u> Pembina Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002				

Form 2.c.3
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:	2025		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Sumber Data	:	Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar			
Program (Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2025)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan		Target
	1	Persentase Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota		100%
Informasi lain				
Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota			
Denpasar, 23 Desember 2024 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  Drs. Faka Purwantara, M.A.P. Pembina Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002				

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali
Nama OPD : Dinas Kebudayaan
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026
Tujuan Strategis : Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar									
1	Sasaran: Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Tidak optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	RSO.25.22.19.01	Kepala Dinas Kebudayaan	Keterbatasan SDM dalam pengolahan kreatifitas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Internal	C	Tidak tercapainya target sasaran	Dinas Kebudayaan
2	Sasaran: Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan budaya	Persentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Tidak terselenggaranya kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang merata sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	RSO.25.22.19.02	Kepala Dinas Kebudayaan	Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya target sasaran	Dinas Kebudayaan
3	Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Persentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Tidak optimalnya partisipasi masyarakat serta lembaga tradisional dalam kegiatan seni dan budaya	RSO.25.22.19.03	Kepala Dinas Kebudayaan	Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya target sasaran	Dinas Kebudayaan
4	Sasaran: Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Persentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	Tidak optimalnya media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	RSO.25.22.19.04	Kepala Dinas Kebudayaan	Penggunaan media dan penyelenggaraan kegiatan inovasi yang belum dimaksimalkan	Internal	C	Tidak tercapainya target sasaran	Dinas Kebudayaan

Denpasar, 23 Desember 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.F.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720219 199101 1 002

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali										
Nama OPD	: Dinas Kebudayaan										
Tahun Penilaian	: 2025										
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026										
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar										
Sasaran Strategis OPD	: 1. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya 2. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Seni 3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Seni dan Budaya 4. Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar										
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Nilai capaian Borang evaluasi PPKD menurun	ROO.25.22.19.01	Sekretariat	Tidak terlaksananya rekomendasi yang ada di dalam rekomendasi PPKD	Internal dan Eksternal	C	Menurunnya kinerja Pemerintah Kota di Urusan Kebudayaan	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Potensi Gratifikasi dalam pemilihan orang - orang yang terlibat di dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RF.25.22.19.01	Sekretariat	Kemungkinan terjadinya gratifikasi agar mereka terpilih dan dilibatkan sebagai penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Internal dan Eksternal	C	Tidak terpenuhinya Dokumen Perencanaan yang diharapkan	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyupap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RF.25.22.19.02	Sekretariat	Kemungkinan terjadinya suap menyupap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RF.25.22.19.03	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Adanya keterlambatan pemberian gaji karena administrasi pendukung yang kurang lengkap (dalam hal ASN yang mengalami kenaikan pangkat)	ROO.25.22.19.02	Sekretariat	SK kenaikan pangkat yang terlambat sehingga proses administrasi menunggu SK turun	Eksternal	C	Gaji bagi ASN yang mengalami kenaikan pangkat menjadi tertunda	ASN Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	RF.25.22.19.04	Sekretariat	Kesalahan perhitungan dalam pembuatan daftar gaji	Eksternal	C	Terganggunya proses pembayaran gaji pegawai	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.22.19.05	Sekretariat	Kurang tertibnya alur pelaporan pegawai kepada Bendahara Gaji terkait status tunjangan anak	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan rutin	Dinas Kebudayaan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Anggaran yang kurang untuk memenuhi logistik kantor	ROO.25.22.19.03	Sekretariat	Kebutuhan melebihi anggaran yang ada	Eksternal	C	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyupat dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.25.22.19.06	Sekretariat	Kemungkinan terjadinya suap menyupat agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.25.22.19.07	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan	Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal perencanaan pada E-Katalog	ROO.25.22.19.04	Sekretariat	Pengadaan Belanja Modal dilaksanakan melalui E-Katalog dan tidak semua barang ada etalase di E-Katalog atau spek barang yang dicari tidak ada di E-Katalog	Eksternal	C	Terhambatnya proses pengadaan barang	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Pengadaan aset baru secara fiktif yaitu melakukan pengadaan dengan bukti barang yang tidak dibeli atau bukti barang yang lama	RF.25.22.19.08	Sekretariat	Adanya keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam pelaksanaan pengadaan barang oleh pejabat yang berwenang	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyupat dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Modal dalam kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RF.25.22.19.09	Sekretariat	Kemungkinan terjadinya suap menyupat agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Modal	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RF.25.22.19.10	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Keterlambatan membayar tagihan listrik, telepon, air, membayar gaji pegawai, dan iuran BPJS	ROO.25.22.19.05	Sekretariat	1. Daftar ampuran gaji yang terlambat di tanda tangan sehingga menghambat proses administrasi dan kadaluarsanya cetakan tagihan pada aplikasi simponi 2. DPA yang agak telat ditetapkan di awal tahun sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran listrik, air, telepon	Internal dan Eksternal	C	Terlambatnya membayar gaji pegawai, iuran BPJS Kesehatan dan pembayaran listrik, air, telepon	Pegawai Non ASN Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan / keadaan yang sebenarnya	RF.25.22.19.11	Sekretariat	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja	Dinas Kebudayaan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.25.22.19.12	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Realisasi anggaran kegiatan tidak bisa terealisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah dirancang	ROO.25.22.19.06	Sekretariat	Kerusakan barang tidak dapat diprediksi/ tidak dapat ditentukan kapan barang tersebut harus dilakukan service	Eksternal	C	Serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyupap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.25.22.19.07	Sekretariat	Kemungkinan terjadinya suap menyupap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.25.22.19.13	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Program: Pengembangan Kebudayaan										
	Kegiatan: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	Pelaksanaan	Persyaratan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang tidak lengkap	ROO.25.22.19.07	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Rekening peserta kegiatan yang tidak aktif	Eksternal	C	Keterlambatan penerimaan hadiah dalam lomba Bulan Bahasa Bali	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyupap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang	RF.25.22.19.14	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kemungkinan terjadinya suap menyupap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan	RF.25.22.19.15	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelaksanaan	Administrasi pelaksanaan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota kesenian tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	ROO.25.22.19.08	Bidang Kesenian	Waktu pelaksanaan kegiatan di awal tahun pada saat belum adanya DPA	Eksternal	C	Terlambatnya realisasi kegiatan	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Tidak dapat menentukan dengan pasti waktu pelaksanaan Misi Kesenian Luar Daerah (JKPI)	ROO.25.22.19.09	Bidang Kesenian	Pelaksanaan mengikuti arahan dari pihak penyelenggara Misi Kesenian Luar Daerah (JKPI)	Eksternal	C	Tidak tercapainya target penyelenggaraan Misi Kesenian Luar Daerah (JKPI)	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Kesulitan dalam mencari peserta lomba Parade Baleganjur	ROO.25.22.19.10	Bidang Kesenian	Keterbatasan anggaran bagi peserta yang ingin mengikuti lomba namun terkendala biaya latihan	Eksternal	C	Tidak tercapainya target peserta	Dinas Kebudayaan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyuiap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.16	Bidang Kesenian	Kemungkinan terjadinya suap menyuiap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.17	Bidang Kesenian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah kepada masyarakat di Bidang Kesenian	RF.25.22.19.18	Bidang Kesenian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	Pelaksanaan	Adanya keterlambatan pemberian jasa kepada Sabha Upadesa, Sulinggih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Kelian, dan Penua Pecalang	ROO.25.22.19.11	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	Adanya pergantian pengurus dan kematian bagi penerima jasa	Eksternal	C	Terlambatnya pemberian jasa	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Administrasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	ROO.25.22.19.12	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	Waktu pelaksanaan kegiatan di awal tahun pada saat belum adanya DPA	Eksternal	C	Terlambatnya realisasi kegiatan	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyuiap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.19	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	Kemungkinan terjadinya suap menyuiap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.20	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah dan BKK kepada masyarakat di Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	RF.25.22.19.21	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Program: Pembinaan Sejarah										
	Kegiatan: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Sulitnya mencari peserta untuk mengikuti Utsawa Dharma Gita dan Pedalangan	ROO.25.22.19.13	Bidang Sejarah dan Dokumentasi	Minimnya sumber Daya Manusia yang berkompetensi dalam hal Utsawa Dharma Gita dan Pedalangan	Eksternal	C	Target peserta kegiatan tidak tercapai	Dinas Kebudayaan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyuiap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.22	Bidang Sejarah dan Dokumentasi	Kemungkinan terjadinya suap menyuiap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.23	Bidang Sejarah dan Dokumentasi	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Program: Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya										
	Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	Perencanaan	Tidak dapat terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	ROO.25.22.19.14	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1. Belum adanya kesepakatan antara pemilik dengan pengusul 2. Karena faktor alam dan manusia	Eksternal	C	Target kegiatan tidak tercapai	Dinas Kebudayaan
			Perencanaan	Potensi Suap Menyuiap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.24	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kemungkinan terjadinya suap menyuiap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Perencanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.25	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan

Denpasar, 23 Desember 2024

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Dr. Raka Purwantara, M.A.P

Rembina Utama Muda

N.P. 19720219 199101 1 002

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali				
Tahun Penilaian	: 2025				
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
II	Risiko Strategis OPD				
1	Tidak optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	RSO.25.22.19.01	4	3	12
2	Tidak terselenggaranya kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang merata sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	RSO.25.22.19.02	4	1	4
3	Tidak optimalnya partisipasi masyarakat serta lembaga tradisional dalam kegiatan seni dan budaya	RSO.25.22.19.03	4	1	4
4	Tidak optimalnya media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	RSO.25.22.19.04	4	1	4
III	Risiko Operasional OPD				
5	Nilai capaian Borang evaluasi PPKD menurun	ROO. 25.22.19.01	3	1	3
6	Adanya keterlambatan pemberian gaji karena administrasi pendukung yang kurang lengkap (dalam hal ASN yang mengalami kenaikan pangkat)	ROO. 25.22.19.02	1	1	1
7	Anggaran yang kurang untuk memenuhi logistik kantor	ROO. 25.22.19.03	1	1	1
8	Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal perencanaan	ROO. 25.22.19.04	1	1	1
9	Keterlambatan membayar tagihan listrik, telepon, air, membayar gaji pegawai, dan iuran BPJS	ROO. 25.22.19.05	1	1	1
10	Realisasi anggaran kegiatan tidak bisa terealisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah dirancang	ROO. 25.22.19.06	1	4	4
11	Persyaratan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang tidak lengkap	ROO. 25.22.19.07	1	3	3
12	Administrasi pelaksanaan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota kesenian tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	ROO. 25.22.19.08	1	3	3
13	Tidak dapat menentukan dengan pasti waktu pelaksanaan Misi Kesenian Luar Daerah (JKPI)	ROO. 25.22.19.09	1	3	3
14	Kesulitan dalam mencari peserta lomba Parade Baleganjur	ROO. 25.22.19.10	1	3	3

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
15	Adanya keterlambatan pemberian jasa kepada Sabha Upadesa, Sulinggih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Kelian, dan Penua Pecalang	ROO. 25.22.19.11	1	3	3
16	Administrasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	ROO. 25.22.19.12	1	3	3
17	Sulitnya mencari peserta untuk mengikuti Utsawa Dharma Gita dan Pedalangan	ROO. 25.22.19.13	1	3	3
18	Tidak dapat terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	ROO. 25.22.19.14	4	3	12
IV	Risiko Fraud OPD				
19	Potensi Gratifikasi dalam pemilihan orang - orang yang terlibat di dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RF.25.22.19.01	3	1	3
20	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RF.25.22.19.02	3	1	3
21	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RF.25.22.19.03	3	1	3
22	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	RF.25.22.19.04	3	1	3
23	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.22.19.05	3	1	3
24	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.25.22.19.06	3	1	3
25	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan	RF.25.22.19.07	3	1	3
26	Pengadaan aset baru secara fiktif yaitu melakukan pengadaan dengan bukti barang yang tidak dibeli atau bukti barang yang lama	RF.25.22.19.08	3	1	3
27	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Modal dalam kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RF.25.22.19.09	3	1	3

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
28	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RF.25.22.19.10	3	1	3
29	Mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan / keadaan yang sebenarnya	RF.25.22.19.11	3	1	3
30	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.25.22.19.12	3	1	3
31	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.25.22.19.07	3	1	3
32	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.25.22.19.13	3	1	3
33	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.14	3	1	3
34	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.15	3	1	3
35	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.16	3	1	3
36	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.17	3	1	3
37	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah kepada masyarakat di Bidang Kesenian	RF.25.22.19.18	3	1	3
38	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.19	3	1	3

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
39	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.20	3	1	3
40	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah dan BKK kepada masyarakat di Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	RF.25.22.19.21	3	1	3
41	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.22	3	1	3
42	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.23	3	1	3
43	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.24	3	1	3
44	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.25	3	1	3
 Denpasar, 23 Desember 2024 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Drs. Raka Purwantara, M.A.P. Pembina Utama Muda N.P. 19720219 199101 1 002					

Form 5
Daftar Risiko Prioritas OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
II	Risiko Strategis OPD					
1	Tidak optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	RSO.25.22.19.01	12	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Keterbatasan SDM dalam pengolahan kreatifitas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tidak tercapainya target sasaran
III	Risiko Operasional OPD					
1	Tidak dapat terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	ROO. 25.22.19.14	12	Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1. Belum adanya kesepakatan antara pemilik dengan pengusul 2. Karena faktor alam dan manusia	Target kegiatan tidak tercapai



Denpasar, 23 Desember 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19720219 199101 1 002

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan OPD
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali Tahun Penilaian : 2025 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b		d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
II Risiko Strategis OPD							
1	Tidak optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	RSO. 25.22.19.01	UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan adanya Tim Ahli Cagar Budaya	Belum adanya kegiatan penetapan cagar budaya	Merancang kegiatan penetapan cagar budaya	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV
III Risiko Operasional OPD							
1	Tidak dapat terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	ROO. 25.22.19.14	Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Terkait Persetujuan dari pemilik 2. Objek Diduga Cagar Budaya berubah bentuk, fungsi dan nilai	1. Pendekatan secara sistematis 2. Pelestarian berupa pencatatan/inventarisasi	Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Triwulan I, II, III, IV



Denpasar, 23 Desember 2024
 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720219 199101 1 002

Form 8
Rencana dan Realisasi Atas Pengkomunikasian Atas Pengendalian yang Dibangun

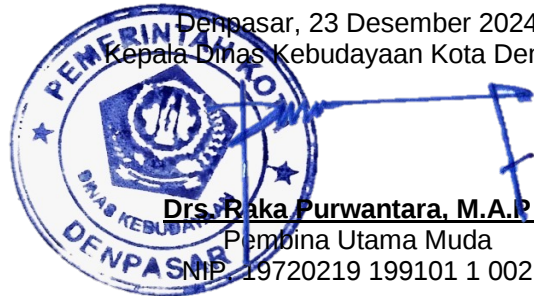
Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali : 2025 : Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
II Risiko Strategis OPD							
1	Tidak optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rapat/ Koordinasi bersama stakeholders	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Stakeholders terkait	Triwulan I, II, III, IV	-	
III Risiko Operasional OPD							
1	Tidak dapat terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Rapat/ Koordinasi bersama stakeholders	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Stakeholders terkait	Triwulan I, II, III, IV		

Denpasar, 23 Desember 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar


Drs. Faka Purwantara, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720219 199101 1 002

Form 9
Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan OPD

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan	: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali : 2025 : Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
II	Risiko Strategis OPD					
1	Tidak optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Konfirmasi dan pemantauan berkelanjutan	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV	Triwulan I, II, III, IV	
III	Risiko Operasional OPD					
1	Tidak dapat terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Konfirmasi dan pemantauan berkelanjutan	Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Triwulan I, II, III, IV	Triwulan I, II, III, IV	



Denpasar, 23 Desember 2024
 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720219 199101 1 002

Form 10
Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Even) dan Pelaksanaan RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
	Masalah/Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis OPD									
1	Tidak optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	RSO.25.22.19.01	-	Keterbatasan SDM dalam pengolahan kreatifitas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tidak tercapainya target sasaran	-	Merancang penetapan cagar budaya	Triwulan I, II, III, IV	-	
2	Tidak terselenggaranya kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang merata sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	RSO.25.22.19.02	-	Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan	Tidak tercapainya target sasaran	-	Menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	Triwulan I, II, III, IV	-	
3	Tidak optimalnya partisipasi masyarakat serta lembaga tradisional dalam kegiatan seni dan budaya	RSO.25.22.19.03	-	Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan	Tidak tercapainya target sasaran	-	Melibatkan lembaga tradisional dalam event pelestarian Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV	-	
4	Tidak optimalnya media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	RSO.25.22.19.04	-	Penggunaan media yang belum dimaksimalkan	Tidak tercapainya target sasaran	-	Memaksimalkan media elektronik maupun media cetak yang dimiliki untuk memberikan edukasi kepada masyarakat	Triwulan I, II, III, IV	-	
	Masalah/Risiko Baru:									
III	Risiko Operasional OPD									
5	Nilai capaian Borang evaluasi PPKD menurun	ROO. 25.22.19.01	-	Tidak terlaksananya rekomendasi yang ada di dalam rekomendasi PPKD	Menurunnya kinerja Pemerintah Kota di Urusan Kebudayaan		Melakukan monitoring melalui borang identifikasi dan borang capaian	Triwulan I, II, III, IV	-	
6	Adanya keterlambatan pemberian gaji karena administrasi pendukung yang kurang lengkap (dalam hal ASN yang mengalami kenaikan pangkat)	ROO. 25.22.19.02	-	SK kenaikan pangkat yang terlambat sehingga proses administrasi menunggu SK turun	Gaji bagi ASN yang mengalami kenaikan pangkat menjadi tertunda		Melakukan rapel terhadap gaji pada bulan berikutnya	Triwulan I, II, III, IV	-	

7	Anggaran yang kurang untuk memenuhi logistik kantor	ROO. 25.22.19.03	-	Kebutuhan melebihi anggaran yang ada	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan		Mengoptimalkan pendistribusian logistik kantor menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	Triwulan I, II, III, IV	-	
8	Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal perencanaan	ROO. 25.22.19.04	-	Pengadaan Belanja Modal dilaksanakan melalui E-Katalog dan tidak semua barang ada etalase di E-Katalog atau spek barang yang dicari tidak ada di E-Katalog	Terhambatnya proses pengadaan barang		Melakukan sosialisasi kepada penyedia untuk mendaftarkan perusahaannya pada e-katalog	Triwulan I, II, III, IV	-	
9	Keterlambatan membayar tagihan listrik, telepon, air, membayar gaji pegawai, dan iuran BPJS	ROO. 25.22.19.05	-	1. Daftar amprahan gaji yang terlambat di tanda tangan sehingga menghambat proses administrasi dan kadaluarsanya cetakan tagihan pada aplikasi simponi 2. DPA yang agak telat ditetapkan di awal tahun sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran listrik, air, telepon	Terlambatnya membayar gaji pegawai, iuran BPJS Kesehatan dan pembayaran listrik, air, telepon		1. Mencari tanda tangan lebih awal sehingga proses administrasi tidak terhambat 2. Mengajukan surat permakluman ke PLN, PDAM, PT. TeLKOM agar tidak melakukan penyesegelan atas keterlambatan pembayaran dan melakukan pembayaran setelah DPA terbit	Triwulan I, II, III, IV	-	
10	Realisasi anggaran kegiatan tidak bisa terealisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah dirancang	ROO. 25.22.19.06	-	Kerusakan barang tidak dapat diprediksi/ tidak dapat ditentukan kapan barang tersebut harus dilakukan service	Serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana		Melakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi barang	Triwulan I, II, III, IV	-	
11	Persyaratan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang tidak lengkap	ROO. 25.22.19.07	-	Rekening peserta kegiatan yang tidak aktif	Keterlambatan penerimaan hadiah dalam lomba Bulan Bahasa Bali	-	Melakukan pemberitahuan awal sebelum kegiatan dilaksanakan kepada seluruh peserta lomba	Triwulan I, II, III, IV	-	
12	Administrasi pelaksanaan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota kesenian tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	ROO. 25.22.19.08	-	Waktu pelaksanaan kegiatan di awal tahun pada saat belum adanya DPA	Terlambatnya realisasi kegiatan	-	Menggunakan acuan tanggal penetapan KUA-PPAS untuk melaksanakan kegiatan	Triwulan I, II, III, IV	-	
13	Tidak dapat menentukan dengan pasti waktu pelaksanaan Misi Kesenian Luar Daerah (JKPI)	ROO. 25.22.19.09	-	Pelaksanaan mengikuti arahan dari pihak penyelenggara Misi Kesenian Luar Daerah (JKPI)	Tidak tercapainya target penyelenggaraan Misi Kesenian Luar Daerah (JKPI)	-	Melakukan komunikasi lebih intens dengan pihak penyelenggara Misi Kesenian Luar Daerah (JKPI)	Triwulan I, II, III, IV	-	

14	Kesulitan dalam mencari peserta lomba Parade Baleganjur	ROO. 25.22.19.10	-	Keterbatasan anggaran bagi peserta yang ingin mengikuti lomba namun terkendala biaya latihan	Tidak tercapainya target peserta	-	Memberikan masukan kepada desa dalam Musrenbang untuk dapat menganggarkan Dana Desa untuk kegiatan Pelestarian Seni dan Budaya	Triwulan I, II, III, IV	-	
15	Adanya keterlambatan pemberian jasa kepada Sabha Upadesa, Sulingih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Kelian, dan Penua Pecalang	ROO. 25.22.19.11	-	Adanya pergantian pengurus dan kematian bagi penerima jasa	Terlambatnya pemberian jasa	-	Melakukan konfirmasi data kepada pihak bersangkutan, merubah lampiran dan merealisasikan pada bulan selanjutnya	Triwulan I, II, III, IV	-	
16	Administrasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	ROO. 25.22.19.12	-	Waktu pelaksanaan kegiatan di awal tahun pada saat belum adanya DPA	Terlambatnya realisasi kegiatan	-	Menggunakan acuan penetapan KUA-PPAS untuk melaksanakan kegiatan	Triwulan I, II, III, IV	-	
17	Sulitnya mencari peserta untuk mengikuti Utsawa Dharma Gita dan Pedalangan	ROO. 25.22.19.13	-	Minimnya sumber Daya Manusia yang berkompetensi dalam hal Utsawa Dharma Gita dan Pedalangan	Target peserta kegiatan tidak tercapai	-	Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait (sekolah dan lembaga adat) untuk pengembangan sumber daya manusia	Triwulan I, II, III, IV	-	
18	Tidak dapat terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	ROO. 25.22.19.14	-	1. Belum adanya kesepakatan antara pemilik dengan pengusul 2. Karena faktor alam dan manusia	Target kegiatan tidak tercapai	-	1. Pendekatan secara sistematis 2. Pelestarian berupa pencatatan/inventarisasi	Triwulan I, II, III, IV	-	
	Risiko Fraud OPD									
19	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.24	-	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Kerugian Keuangan Negara	-	Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.25	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	

21	Potensi Gratifikasi dalam pemilihan orang - orang yang terlibat di dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RF.25.22.19.01	-	Kemungkinan terjadinya gratifikasi agar mereka terpilih dan dilibatkan sebagai penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Tidak terpenuhinya Dokumen Perencanaan yang diharapkan		Memilih orang - orang yang lebih berkompetensi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Triwulan I, II, III, IV	-	
22	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RF.25.22.19.02	-	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Kerugian Keuangan Negara		Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
23	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RF.25.22.19.03	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
24	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	RF.25.22.19.04	-	Kesalahan perhitungan dalam pembuatan daftar gaji	Terganggunya proses pembayaran gaji pegawai		Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait pembuatan daftar gaji	Triwulan I, II, III, IV	-	
25	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.22.19.05	-	Kurang tertibnya alur pelaporan pegawai kepada Bendahara Gaji terkait status tunjangan anak	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan rutin		Melakukan himbauan berkala kepada seluruh pegawai terkait administrasi yang harus dilaksanakan dalam hal gaji/pendapatan pegawai	Triwulan I, II, III, IV	-	
26	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.25.22.19.06	-	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Kerugian Keuangan Negara		Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
27	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.25.22.19.07	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	

28	Pengadaan aset baru secara fiktif yaitu melakukan pengadaan dengan bukti barang yang tidak dibeli atau bukti barang yang lama	RF.25.22.19.08	-	Adanya keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam pelaksanaan pengadaan barang oleh pejabat yang berwenang	Kerugian Keuangan Negara		Pengawasan atas Aset	Triwulan I, II, III, IV	-	
29	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Modal dalam kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RF.25.22.19.09	-	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Modal	Kerugian Keuangan Negara		Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
30	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RF.25.22.19.10	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
31	Mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan / keadaan yang sebenarnya	RF.25.22.19.11	-	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja		Penelitian dan/atau pencermatan penyusunan anggaran secara berjenjang dan berkala	Triwulan I, II, III, IV	-	
32	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.25.22.19.12	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
33	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.25.22.19.07	-	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Kerugian Keuangan Negara		Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
34	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.25.22.19.13	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	

35	Potensi Suap Menyuiap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.14	-	Kemungkinan terjadinya suap menyuiap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Kerugian Keuangan Negara		Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
36	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.15	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
37	Potensi Suap Menyuiap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.16	-	Kemungkinan terjadinya suap menyuiap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Kerugian Keuangan Negara		Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
38	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.17	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
39	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah kepada masyarakat di Bidang Kesenian	RF.25.22.19.18	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
40	Potensi Suap Menyuiap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.19	-	Kemungkinan terjadinya suap menyuiap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Kerugian Keuangan Negara		Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing		-	
41	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.20	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada		-	

42	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah dan BKK kepada masyarakat di Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	RF.25.22.19.21	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada		-	
43	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.22	-	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Kerugian Keuangan Negara		Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing		-	
44	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.25.22.19.23	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara		Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada		-	
	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 23 Desember 2024

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19720219 199101 1 002